UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI.....ii

PERNYATAAN.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR SINGKATAN.....xiii

DAFTAR TABEL.....xv

INTISARI.....xvi

ABSTRACT.....xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…….....1

B. Permasalahan…….....19

C. Tujuan Penelitian……..…….....19

D. Manfaat Penelitian…….....20

E. Keaslian Penelitian……..……..……...22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Kewenangan Mengatur.....29

2. Memahami Masalah kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan.....40

b. Penyebab Kemiskinan.....47

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

c. Penanganan Fakir Miskin.....54

B. Landasar Teori

1. Teori Dasar (*Garnd Theory*), Negara Kesatuan.....63

2. Teori Pendukung (*Middle Range Theory*), Teori Otonomi.....70

3. Teori Terapan (*Applied Theory*)

a. Teori Otonomi Khusus.....78

b. Politik Hukum.....103

c. Teori Keadilan.....115

d. Teori Pengawasan.....117

BABA III METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian.....128

B. Jenis Penelitian.....129

C. Jenis Data.....132

D. Cara Pengumpulan Data.....139

E. Metode Analisa Data.....140

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penanganan Fakir Miskin Pada Era Otonomi

Khusus Di Provinsi Papua.....143

1. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua

Nomor 25 Tahun 2013.....144

2. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2010.....176

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008.....181

4. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013.....200

5. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2013.....215

6. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010.....225

B. Faktor Penyebab Belum Terpenuhinya hak Fakir Miskin.....252

1. Pengaturan Kewenangan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Penerapan Kewenangan Belum Dilakukan Secara Kekhususan.....252

a. Pengaturan Dan Pelaksanaan Perekonomian Berbasis Kerakyatan Belum Memenuhi Prinsip Otonomi Khusus.....255

b. Pengaturan Dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Belum Memenuhi Prinsip Otonomi Khusus.....265

c. Pengaturan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Belum Memenuhi Prinsip Otonomi Khusus.....278

2. Pengaturan Dana Otonomi Khusus Belum Mengutamakan Untuk Pembiayaan Pendidikan Dan Pembiayaan Kesehatan Pada Daerah-Daerah Tertinggal.....284

3. Lemahnya Pengawasan DPRP Dan MRP.....292

C. Langkah Hukum Yang Perlu Dilakukan Agar Terpenuhinya Hak Fakir Miskin.....319

1. Pengaturan Kewenangan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Provinsi Papua Dalam

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Penerapan Kewenangan Dilakukan Secara Kekhususan.....319

a. Pengaturan Dan Pelaksanaan Perekonomian Berbasis Kaerakyatan Yang Memenuhi Prinsip Otonomi Khusus.....322

b. Pengaturan Dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi KAT Yang Memenuhi Prinsip Otonomi Khusus.....337

c. Pengaturan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Prinsip Otonomi Khusus.....342

2. Pengaturan Dana Otonomi Khusus Yang Penggunaannya Mengutamakan Untuk Pembiayaan Pendidikan Dan Kesehatan Pada Daerah-Daerah Tertinggal.....347

3. Meningkatkan Pengawasan DPRP Dan MRP.....354

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……..……..359

B. Saran……...……..……363

DAFTAR PUSTAKA……..……..365